

TESIS

**PENGGABUNGAN ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK
NEGARA DALAM PEMBENTUKAN BANK SYARIAH INDONESIA**

*(Diajukan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister
Kenotariatan)*



Program Studi: Magister Kenotariatan

MAGISTER KENOTARIATAN

PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2024

PENGGABUNGAN ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PEMBENTUKAN BANK SYARIAH INDONESIA

ABSTRAK

**(Nadia Rezki Oktarina, 2220123031, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum,
Universitas Andalas)**

Bank Syariah Indonesia atau BSI terbentuk akibat dilakukannya merger oleh 3 anak usaha BUMN yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk., PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri yang mana PT Bank BRI Syariah Tbk bertindak sebagai Bank yang menerima Penggabungan. Pada lembar pengumuman yang sama terkait *hasil merger*, selanjutnya PT Bank BRI Syariah Tbk berganti nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Dimana tanggal efektif berlakunya penggabungan berlaku sama dengan tanggal efektif pergantian nama ini. Sehingga jika dilihat pada proses publiknya saja, banyak yang akhirnya menganggap bahwa proses yang dilakukan dalam pembentukan Bank Syariah Indonesia ini adalah proses Konsolidasi karna menimbulkan sebuah perusahaan baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif yang dilakukan dengan upaya mendapatkan data yang dibutuhkan yang berhubungan dengan permasalahan data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari data primer, sebagai pendukung bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode Analisis Kualitatif. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan Pengaturan penggabungan anak perusahaan BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia secara umum diatur oleh UUPT, selain itu ada beberapa aturan terkait yang mengatur seperti Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengalihan Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1999 Tentang Merger Konsolidasi dan Akuisisi Bank. Penggabungan ini menggabungkan PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri kedalam PT Bank BRI Syariah Tbk. adapun nama Bank Syariah Indonesia sendiri muncul setelah RUPSLB PT Bank BRI Syariah Tbk. yang menyetujui perubahan nama perseroan bersamaan dengan tanggal efektif Penggabungan Berlaku. Akibat hukum dilakukannya penggabungan anak perusahaan BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan dan meleburkan diri berakhir karna hukum terhitung sejak tanggal penggabungan atau peleburan mulai berlaku. Selain berakhirnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri, Bubarnya perseorangan peserta penggabungan juga mengakibatkan aktiva dan pasivanya beralih karna hukum kepada perseroan penerima penggabungan sehingga berubahnya manajemen perusahaan penerima penggabungan. Terakhir, Pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri secara hukum akan menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan tetapi dengan hak suara yang berbeda sesuai dengan pengkonversian saham yang di setujui.

Kata Kunci: *merger, anak perusahaan BUMN, Bank Syariah Indonesia*

THE ROLE OF STATE-OWNED ENTERPRISES' SUBSIDIARY MERGERS IN BANK SYARIAH INDONESIA ESTABLISHMENT

ABSTRACT

**(Nadia Rezki Oktarina, 2220123031, Thesis, Notary Masters Study Program, Program
Faculty of Law, Andalas University)**

Bank Syariah Indonesia or BSI was formed from the merger of 3 state-owned subsidiaries, namely PT Bank BRI Syariah Tbk., PT Bank BNI Syariah and PT Bank Syariah Mandiri, where PT Bank BRI Syariah Tbk acted as the recipient of the bank merger. On the same announcement sheet regarding the merger results, PT Bank BRI Syariah Tbk subsequently changed its name to PT Bank Syariah Indonesia Tbk, where the effective date of the merger is the same as the effective date of this name change. If we merely look at the public process, many ended up assuming the process carried out in the formation of Bank Syariah Indonesia is a consolidation process because it creates a new company. The method used in this research is Normative Juridical research, which is carried out in an effort to obtain the required data related to the problem. The data used is Secondary Data consisting of Primary Data, as support for secondary legal materials and tertiary legal materials. Primary Data also used to supported secondary data's legal material. Data analysis was carried out with the Qualitative Analysis method. The author concludes the results of this research that the merger regulation of BUMN subsidiaries into Bank Syariah Indonesia is generally regulated by the PT UUPT, aside from several related regulations that regulate it, such as Government Regulation No. 27 of 1998 concerning Mergers, Consolidations and Transfers of Limited Liability Companies and Government Regulation No. 28 of 1999 concerning Bank Consolidation Mergers and Acquisitions. This merger combines PT Bank BNI Syariah and PT Bank Syariah Mandiri into PT Bank BRI Syariah Tbk. Meanwhile, the name Bank Syariah Indonesia itself appeared after PT Bank BRI Syariah Tbk's EGMSL who approved the company changing name the same time as the effective merger date. Legal consequences of BUMN subsidiary merging into Bank Syariah Indonesia resulted in the company merging and merging itself ending due to the law starting from the effective merger date coming into force. Apart from the ended legal entity status of merged companies. The dissolution of the company participating in the merger also resulted in its assets and liabilities being transferred by law to the company receiving the merger, resulting in changes in the management of the company receiving the merger. Finally, the company shareholder that merges legally becomes the company shareholders that accepts the merger but with different voting rights according to the approved share conversion.

Keywords: merger, EGMSL's subsidiary, Bank Syariah Indonesia